

Judul : Saudi Resmi Buka Ibadah Umrah bagi Indonesia
Tanggal : Rabu, 01 Desember 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Saudi Resmi Buka Ibadah Umrah bagi Indonesia

Meskipun pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan calon jemaah umrah asal Indonesia, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi para calon jemaah.

MOHAMAD FARHAN ZHUHRI
 zhuhri@mediaindonesia.com

KEBIJAKAN pemerintah Arab Saudi mencabut suspend penerbangan langsung dari Indonesia menandakan dibukanya pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia. Keputusan itu berlaku mulai 1 Desember 2021.

"Pengumuman resmi pencabutan penutupan pintu masuk tersebut telah disampaikan pada 25 November 2021. Dengan pembukaan suspend tersebut, otomatis penyelenggaraan ibadah umrah juga dibuka," kata Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Kesepakatan itu diperoleh, lanjutnya, setelah ia melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka memenuhi undangan Menteri Urusan Islam, Dakwah,

dan Penyuluhan Kerajaan Arab Saudi, Syekh Abdulatif bin Abdulaziz.

Untuk memperlancar pelaksanaan umrah tersebut, Menag pun meminta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mempercepat pembuatan skema pemberangkatan umrah pada 2021 agar tidak tertunda keberangkatan para jemaah ke Tanah Suci Mekah.

"Insha Allah untuk umrah ini saya sudah minta dirjen haji membuat skema *as soon as possible*, secepatnya, jadi jangan terlalu lama ditunda," ungkapnya. Yaqut menambahkan, meskipun pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan jemaah asal Indonesia melaksanakan umrah, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi para calon jemaah umrah.

Pertama, calon jemaah harus mendapatkan dosis lengkap vaksin covid-19. Bagi mereka yang diimunisasi dengan vaksin yang

Arab Saudi Cabut Larangan Penerbangan Langsung dari Indonesia

Pemberlakuan

- Mulai 1 Desember 2021

Manfaat Pencabutan Larangan

- Warga Indonesia diperbolehkan masuk ke Arab Saudi tanpa melalui negara ketiga selama 14 hari.
- Tidak lagi ada persyaratan booster.
- Kegiatan umrah dapat dilaksanakan kembali.

Aturan Sebelumnya

Februari 2021

- Arab Saudi memberlakukan larangan terbang untuk Indonesia dan sejumlah negara lainnya.

Akhir Agustus 2021

- Penerbangan dari Indonesia diperbolehkan secara langsung, tetapi dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki izin tinggal di Arab Saudi, baik mukimin atau ekspatriat.

Jemaah Umrah yang Menjadi Prioritas Indonesia

- Terdapat 59.757 jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya akibat covid-19.
- 18.752 jemaah di antaranya telah memiliki visa dan siap berangkat pada Desember 2021.

Negara Lain yang Mendapat Izin Masuk ke Arab Saudi

- Pakistan
- Vietnam
- Brasil
- Mesir
- India



Sumber: Kemenag/GACA/Litbang MI

diakui pemerintah Arab Saudi (Pfizer, AstraZeneca, Johnson and Johnson, dan Moderna), mereka bisa langsung melaksanakan ibadah haji kecil itu setelah tiba di Tanah Suci.

"Calon jemaah Indonesia yang sudah menerima dosis lengkap yang diakui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni Sinovac, tetap diperkenankan melakukan umrah, tetapi mereka

harus melewati masa karantina selama tiga hari," tambah Ketua Umum GP Ansor itu.

Setelah 48 jam (menjalani karantina), katanya lagi, akan dilakukan tes PCR. Jika dinyatakan negatif langsung dibolehkan melaksanakan umrah.

Simulasi haji 2022

Kementerian Agama fokus menyukseskan umrah pada awal Desember 2021. Pasalnya, penyelenggaraan ibadah haji kecil itu dianggap sebagai simulasi kesiapan penyelenggaraan haji 2022.

"Jadi, kunci terbuka atau tidaknya haji di 1443 Hijriah nanti itu ya tergantung pada kita mampu melaksanakan ibadah umrah dengan baik," imbuh Yaqut.

Menurut politikus PKB itu hingga saat ini belum ada keputusan dan penandatanganan nota kesepakatan atau MoU dengan Arab Saudi.

Sementara itu, saat dihubungi secara terpisah, Sekjen Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Arth Hanif, mengatakan pemerintah harus tetap mengambil peran sebagai regulasi yang diatur oleh undang-undang.

"Jangan mengambil peran yang domainnya swasta, pemerintah sebagai regulator, dan jangan terlalu jauh intervensi proses pelaksanaan umrah," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Artha, tidak perlu membuat skema khusus. Sebab, yang paling penting bagi Kesthuri, pemerintah datang ke Arab Saudi dengan target dibayarnya sebagaimana ketentuan yang ada. (MGN/X-7)